

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini menganalisa mengenai partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pada tahun 2017. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas dalam segala hal kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX mengenai pembangunan yang ada di desa dan kawasan pedesaan merupakan suatu perpaduan antar desa dalam satu kota/kabupaten, tentu dengan adanya pembangunan desa memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Sedangkan pada pasal 68 ayat 2 menjelaskan bahwa masyarakat desa berkewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangatlah penting agar dapat membantu dan mempercepat program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat, sehingga proses pembangunan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu dibutuhkan peran masyarakat untuk terlibat langsung dari tingkatan terkecil yaitu RT, RW,

Dukuh, Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten Kota. Adapun melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan di wilayah setempat dimulai dari musyawarah dukuh hingga musyawarah desa. Proses tahap perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan forum musyawarah yang melibatkan semua unsur masyarakat. Adanya musrenbang tentu menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa rencana program pembangunan dapat diterima oleh seluruh pihak masyarakat yaitu dengan menampung segala usulan masyarakat.

Adanya perencanaan partisipatif menjadikan pemerintah desa melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat desa untuk menggali ide, gagasan, serta masalah yang sering dihadapi, demi mempercepat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi, masih banyak permasalahan maupun program yang belum terlaksana terkait dengan pembangunan desa berupa fisik maupun non fisik seperti akses jalan desa yang rusak, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut (Febrian, 2018) pembangunan pedesaan meliputi adanya pemanfaatan serta penggunaan wilayah yang tepat dan digunakan sesuai tata ruang, dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Welasari & Ardiansyah, 2018) bahwa

pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat, dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam program pembangunan desa

Menurut (Hakim, 2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya pembangunan disuatu daerah maupun wilayah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya harapan untuk mensejahterkan masyarakat maka dalam pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan partisipasi masyarakat. Segala program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat melihat dan mengetahui permasalahan serta kebutuhan dalam rangka membangun wilayah desanya. Masyarakatlah yang nantinya memanfaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan dengan menilai apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak bermanfaat sama sekali. Peran masyarakat sangat penting dalam berpartisipasi terhadap program-program pembangunan yang ada di desa, walaupun terdapat beberapa perbedaan dengan respon dilapangan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan dapat mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan itu sendiri. Partisipasi dalam pembangunan berguna untuk memaksimalkan rencana maupun program

demi kelancaran efektivitas pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan mampu mengembangkan desa demi kepentingan bersama. Sehingga, desa dapat mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki demi mengurangi tingkat kemiskinan dan memperlancar ekonomi masyarakat desa.

Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 32 tahun 2004 pemerintah memberikan otonominya kepada daerah langsung, dimana pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola, mengatur, membangun dan mewujudkan dalam hal mengembangkan potensi sumberdaya desa dalam memperkuat perekonomian serta pembangunan desa sehingga terwujudnya desa yang mampu berkompetensi dengan desa lainnya. Pada dasarnya pembangunan bertujuan membangun kemandirian, terlebih pembangunan pedesaan.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam UU No 32 Tahun 2004 pemerintah pusat menjalankan atas kewenangannya. Sedangkan, sisa dari kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan otonomi daerah tersebut berhenti di Kabupaten/ Kota. Akibatnya, desa yang secara struktur berada di bawah Kabupaten/ Kota hanya menjalankan kewenangan atas pemerintah kota. Desa merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/ Kota yang hanya menjalankan kewenangan yang

diberikan oleh Kabupaten/ Kota yang seakan akan desa tidak mempunyai otonominya sendiri.

Berdasarkan pada sistem pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini biasa disebut dengan Otonomi Desa, dimana Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi Negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, dimana tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak akan berhasil dengan optimal.

Dengan realita yang terjadi, tidak sedikit pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik, banyak pemerintah desa yang menyelewengkan Dana Desa maupun Anggaran Desa. Sehingga dana yang seharusnya menjadi anggaran untuk pembangunan desa justru di gunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan informasi dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam acara TV yang berjudul “Pantauan ICW soal Korupsi Dana Desa” banyak desa yang melakukan korupsi pada tahun 2016-2017 yaitu sekitar 110 kasus korupsi dan kerugian negara mencapai 30 miliar. Dari penemuan ICW hampir seluruh pelaku di dominasi oleh kepala desa. Banyaknya masalah yang terjadi di desa tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan desa menjadi buruk. (*Kompas.com*)

Terlebih masih banyak desa yang belum mempunyai infrastruktur yang baik seperti akses jalan bagus, sarana prasarana yang kurang memadai dan masyarakat yang kurang sejahtera. Sehingga masalah tersebut dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat desa, dimana akses jalan merupakan penunjang perekonomian. Dengan demikian, pembangunan desa menjadi sangat penting untuk kesejahteraan perekonomian desa agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu, untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peran pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat agar berpartisipasi guna menciptakan pemerintahan yang baik.

Dari hasil observasi yang ditinjau bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Raji Kecamatan Demak belum optimal.

Pada tahun 2017 ternyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih tergolong rendah dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 berjumlah 5.232 jiwa atau 2.643 Kepala Keluarga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu hanya berupa bantuan tenaga saja, tidak ada sumbangan bantuan berupa dana dari masyarakat, karena pemerintah dan masyarakat hanya mengandalkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga, terdapat beberapa program pembangunan sarana dan pra sarana yang belum selesai seperti selokan air yang mampet, rehabilitasi gedung balai desa, fasilitas gedung, taman baca, pembangunan masjid yang belum selesai. Akan tetapi, berdasarkan informasi oleh Sapto Sari Jati menyebutkan bahwa dalam sebuah acara/ lomba yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jateng dengan tema “Evaluasi Perkembangan Desa 2018” menyebutkan bahwa desa raji ini masuk dalam kategori enam desa yang berhasil dalam pembangunan desa, administrasi dan pemberdayaan masyarakat. (www.jatengprov.go.id)

Melihat dengan dari kesuksesan pembangunan tersebut, bisa dikatakan desa raji mengalami perkembangan. Tentu dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak luput dari peran aktif pemerintah desa dan masyarakat desa raji dalam hal pembangunan desa, dengan memiliki jumlah penduduk 1864 kepala keluarga dan 5725 jiwa dengan mata pencarian sebagai petani. Berdasarkan berita acara di media *online* jatengprov.go.id Arif Husni menyatakan bahwa “Desa Raji mampu menciptakan pembangunan yang begitu pesat dengan partisipasi

masyarakat yang tingii, pemerintah desa yang tertib akan administrasi desa, dan adanya inovasi teknologi yang tepat sesuai kegunaan”. Adapun keunggulan lainnya adalah dibidang pertanian, desa raji mempunyai lahan seluas 40-50 ha yang ditanami tanaman sorgum yang diolah oleh KWT (Kelompok Wanita Tani) sebagai aneka makanan ringan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Inilah yang menjadikan desa raji mempunyai keunggulan dibanding desa-desa yang belum termasuk dalam desa terbaik di Jateng, sehingga dengan adanya penghargaan tersebut desa Raji mampu dijadikan contoh bagi desa-desa lainnya. (www.jatengprov.go.id)

Adapun dalam berita tersebut Kepala Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Drs H Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa adanya Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan atau Lomba Desa sebagaimana dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2011 merupakan agenda rutin dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan desa dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Program ini dapat mengapresiasi desa yang mampu mengoptimalkan SDA yang dimiliki oleh desa serta agar dapat menciptakan desa mandiri dan berinovasi yang mengubah suatu kelemahan menjadi keunggulan. (www.jatengprov.go.id)

Sesuai dengan penjelasan diatas, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting diperlukan, hal ini dapat dijadikan bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat guna untuk memajukan daerahnya. Oleh karena itu, penulis ingin

mengetahui lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di Desa Raji dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Raji. Tentu, banyak hal yang harus diketahui dalam mempersiapkan dan menjalankan program pembangunan desa.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas mengenai partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di Desa Raji Tahun 2017, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Raji?
2. Faktor apa saja yang menjadi pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tahun 2017.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam proses penelitian ini peneliti berharap karya tulis ini dapat dijadikan sebagai landasan dan manfaat bagi semua pihak. Manfaat karya tulis ini adalah:

1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bagi studi ilmu pemerintahan khususnya terkait dengan sistem informasi pemerintah desa dalam bidang pembangunan desa serta menambah wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di suatu desa.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur pemerintah dalam pembangunan desa agar pemerintah bisa lebih merencanakan dan mengelola pembangunan desa dengan baik
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa mulai dari perencanaan dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa

- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa, yang kelak berguna di lain waktu dan dapat dijadikan landasan dan rujukan oleh peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan mengacu berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang ada pada skripsi ini. Adapun peneliti yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

Dea Deviyanti dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan disana belum optimal karena di dalam perencanaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dengan memberikan swadaya dalam bentuk tenaga tanpa adanya bentuk swadaya materi (Dana). Selain itu, hasil dari pembangunan tersebut sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat serta masyarakat ikut terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan tersebut. Adapun untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di kelurahan karang jati masih mengalami berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal

yang dihadapi berupa masyarakat yang masih bergantung kepada pihak pemerintah, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan, faktor kesibukan pekerjaan yang menjadikan mereka kurang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

M. Rian Sentosa dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi kasus: Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tegalrejo dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Akan tetapi masyarakat merasa aspirasi dan ide mereka tidak di dengarkan oleh pemerintah desa setempat karena pemerintah desa sendiri telah mempunyai rancangan pembangunan berdasarkan pembangunan sebelumnya. Adapun partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan berupa beberapa program pembangunan seperti partisipasi dalam program kesehatan, program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat desa dan program pengembangan nilai budaya dan social. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam pembangunan juga berupa bentuk pemberian bantuan dana dan bentuk tenaga

Rahma Dian Puspitasari dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tahun 2016”. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa wayang dalam berswadaya. Adapaun sesuai dengan pernyataan dari pihak Pemerintah Desa Wayang yang menjelaskan bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat desa mau untuk berpartisipasi dalam hal swadaya/ gotongroyong. Akan tetapi, terdapat satu dukuh yang sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan, adapaun satu dukuh yang dianggap kurang aktif lebih sedikit yang hadir pada saat pelaksanaan pembangunan dibandingkan dua dukuh lainnya.

Teraik Kagoya, Benu Olfie, Olly Esry Laoh dalam laporan jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap dalam tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu: tahap perencanaan, adapun tingkat partisipasinya berupa memberikan usul maupun saran untuk rencana pembangunan jalan desa. Tahap pelaksanaan, adapun tingkat partisipasinya berupa membantu dengan tenaga, menyumbangkan dana maupun material. Tahap pemeliharaan, tahap ini diperlukan kesedaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara

infrastruktur yang sudah dikerjakan. Data menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan terbesar adalah sumbangan tenaga yaitu 77% dan tahap pemeliharaan.

Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamk Naping dalam laporan disertasi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Program Alokasi Dana Desa di Desa Biola Kabupaten Bulukumba)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa berdasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dari tahap persiapan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana, material. Tingkat kesejahteraan masyarakat setempat merupakan suatu penentu seberapa besar kontribusi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Selain itu, penentu lain adalah faktor waktu yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dimana setiap individu mempunyai kesibukan yang berbeda setiap harinya. Partisipasi masyarakat di Desa Biola yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat dan bukan untuk membantu pemerintah dalam penyediaan dana maupun tenaga.

Andi Asnuddin dalam laporan jurnal yang berjudul “Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan proyek Infrastruktur pedesaan di Indonesia”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur pedesaan dengan menggunakan pendekatan program partisipatif masyarakat akan semakin efektif dalam mendukung pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur pedesaan mendorong ketersediaan infrastruktur sebagai sarana yang digunakan untuk menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa kegiatan yang dibutuhkan dalam program dengan pendekatan partisipatif antara lain: penguatan kelembagaan tingkat masyarakat, mendorong penguatan modal-modal social yang ada pada masyarakat, sosialisai program dengan menggunakan berbagai media serta pemberian rewar untuk daerah sasaran yang dianggap berhasil dalam pembangunan.

Nugraheni Arumsari, Wenny Eka Septina, Muhammad Luthfi, Nur Kholis Ali Rizki dalam laporan jurnal yang berjudul “Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa (Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum, terlebih komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala desa sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program yang sedang berlangsung. Gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa di 3 desa tersebut yaitu: pendekatan langsung dengan masyarakat (Komunikasi Interpersonal), Pendekatan antar lembaga kemasyarakatan desa (Kelompok Organisasi), komunikasi publik dengan menggunakan media sosial dan badan informasi public sebagai media

untuk menginformasikan anggaran tahunan desa sebagai bentuk transparansi dan sosialisasi resort desa dan gerakan pendidikan pedesaan.

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, adanya teori merupakan sebuah hal yang sangat penting sehingga masalah dalam penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah di tentukan, demikinan teori berfungsi sebagai landasan dalam suatu penelitian. Pedoman atau landasan teori perlu digunakan agar dapat memahami masalah yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berasal dari kata "*Participate*" atau "*Participation*" yang berarti tindakan keikutsertaan dan turut berperan dalam suatu kegiatan. Menurut Hoofsteede dalam Henryk (2013) menyebutkan bahwa "*the taking part in of more phases of the process*" yang berarti partisipasi memiliki andil dalam suatu tahap. Proses yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses dalam hal pembangunan (Henryk, 2013).

Partisipasi menurut Keith Davis dalam Henryk (2013) menyebutkan bahwa partisipasi adalah "*as mental and emotional inovolment of person in a group situasion which encourage him to contribute to group goals and share responsibility in them*" yang berarti keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada

tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawa untuk kelompok itu sendiri (Henryk, 2013).

Menurut Patton dalam Henryk (2013) menyebutkan bahwa “inisiatif atau prakarsa dalam berpartisipasi bias berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (*bottom up*) dan berasal dari pemerintah (*top down*). Dimana dalam pembangunan desa atau kelurahan, bentuk tenaga yang berupa sebuah inisiatif merupakan titik awal dari sebuah partisipasi masyarakat” (Henryk, 2013)

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang. Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 124) “*the taking part in one of more phases of the process*” yang berarti partisipasi merupakan bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan.

Menurut Juliantara dalam Deviyanti (2013) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif (Deviyanti, 2013).

Sementara partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Deviyanti (2013) menyebutkan bahwa adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Deviyanti, 2013).

Adapaun menurut Deviyanti (2013) mengatakan bahwa partisipasi melibatkan lebih banyak mental daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi "sukarela". Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa (Deviyanti, 2013). Menurut Juliantara dalam Deviyanti (2013) partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif (Deviyanti, 2013).

Bintoro Tjokroamidjoyo dikutip oleh Anwar dalam (Puspitasari, 2017) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat yang berperan dalam menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu partisipasi nyata masyarakat tidak hanya ikut serta dalam pembangunan. Tetapi masyarakat juga ikut memikul beban, hasil atau manfaat dari pembangunan.

Adapun menurut Sondang P. Siagian dikutip oleh Anwar dalam (Puspitasari, 2017) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dan elemen pemerintah. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program tidak hanya untuk masyarakat maupun pemerintah saja, tetapi seluruh penduduk di suatu daerah setempat. Menurut Peter du Sautoy di kutip oleh Ndraha dalam (Puspitasari, 2017) menjelaskan bahwa partisipasi dapat dianggap sebagai suatu tolak ukur dalam mengukur dan menilai apakah program yang sedang dijalankan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Jika masyarakat tidak berkesempatan dan ikut berperan adil dalam pembangunan suatu program di desanya, maka proyek dan program tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan desa.

Jnanabrota Bhattacharyya dikutip oleh Ndraha dalam (Puspitasari, 2017) partisipasi diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan dalam kegiatan bersama. Dengan kata lain, partisipasi menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam kegiatan bersama demi

terciptanya suatu keberhasilan. Seperti menurut Adisasmita 2006 dalam Mustanir partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta pemanfaatan dan menikmati hasil pembangunan.

Menurut Isbandi 2007 dalam Mustanir menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat tersebut dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi menurut Deviyanti (2013) yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam suatu program pembangunan, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki bentuk) dan bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Adapun contoh bentuk partisipasi yang nyata seperti uang, harta benda, tenaga. Sedangkan contoh dari bentuk partisipasi yang tidak nyata seperti partisipasi dalam buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi repserentatif (Deviyanti, 2013).

Adapun menurut Holil dalam Isbandi (2007) yang dikutip oleh (Deviyanti, 2013) menyatakan bahwa adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk berupa gotong royong untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang, tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian dan seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan program pembangunan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbangkan harta benda, contohnya berupa alat-alat kerja atau perkakas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Sedangkan menurut Chapin dalam Abe 2002 yang dikutip oleh (Deviyanti, 2013) menyatakan bahwa adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
4. Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Hakim, 2017) menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan sistem dan mekanisme yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
3. Partisipasi masyarakat dalam hasil pembangunan
4. Pelaksanaan dalam evaluasi

Sedangkan menurut Eriscon dalam (Slamet, 2004.89)

bentuk partisipasi dalam pembangunan terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan

Sedangkan menurut Rohmad dalam (Puspitasari, 2017) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi uang adalah sebuah bentuk partisipasi materi berupa uang untuk memperlancar usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat maupun pembangunan di suatu daerah
2. Partisipasi harta benda adalah sebuah bentuk partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda yang berupa alat perkakas/ alat kerja yang diperlukan dalam suatu pembangunan atau proyek
3. Partisipasi tenaga adalah sebuah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk membantu pelaksanaan usaha dan menunjang keberhasilan suatu program/ pembangunan
4. Partisipasi keterampilan adalah sebuah usaha dalam memberikan suatu dorongan melalui keterampilan yang

dimilikinya kepada masyarakat lain atau pemerintah yang sedang membutuhkan

5. Partisipasi buah pikiran adalah sebuah partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan ide, pikiran, dan pendapat. Baik untuk menyusun sebuah program maupun untuk mempelancarpelaksanaan program serta untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan demi mengembangkan kegiatan/ program pembangunan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell seperti yang dikutip oleh Ross dalam (Firnando, 2017) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi adalah:

1. Usia

Faktor usia merupakan sebuah faktor yang sangat mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan norma masyarakat yang lebih mantap, usia tersebut cenderung lebih banyak berpartisipasi dibandingkan mereka yang berusia tua dan muda.

2. Pendidikan

Sebuah pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Pendidikan dianggap mempunyai nilai lebih dan dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Jenis Kelamin

Dalam budaya berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang perempuan hanya bertempat “di dapur” yang berarti bahwa dalam masyarakat peranan seorang perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi semakin lama nilai dan peran seorang perempuan telah bergeser dengan adanya emansipasi dan pendidikan yang semakin baik

4. Jenis Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan Penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yang harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

5. Lamanya Tinggal

Dengan adanya seseorang yang tinggal lama dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi baik dengan lingkungan tersebut, maka akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut T.B. Simatupang dalam Khairuddin (2000) yang dikutip oleh (Henryk, 2013) memberikan beberapa rincian mengenai partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang dijalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warna Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam atau dasar hal dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita
3. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan mertabat manusia dan untuk generasi-generasi yang akan datang.

c. Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat dalam (Istianah, 2012) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, dalam arti mereka melakukan aktivitas dengan berkomunikasi dengan oranglain. Definisi lain, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi berdasarkan suatu sistem adat yang bersifat *continue* (berkelanjutan) yang terikat oleh rasa identitas bersama. Dalam hal ini, *continue* merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki 4 ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Menurut Mac Iver dan Page dalam (Soekanto, 2006) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kelompok yang bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ralph Linton dalam (Soekanto, 2006) masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai kelompok sosial dengan batasan yang jelas.

2. Pembangunan

Pengertian pembangunan menurut Henryk (2013) diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses yang

menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*) (Henryk, 2013).

Menurut Teguh Yuwono dalam Henryk (2013) mengatakan bahwa “Pembangunan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya pembangunan mempunyai tujuan yaitu pembinaan bangsa atau perkembangan sosial ekonomi (Henryk, 2013)”.

Menurut S.P. Siagian dalam (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Menurut Henry dalam Milasti (2016) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu “Proses”. Proses yang menggambarkan adanya suatu pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan atau perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya,

hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (Milanti, 2016).

Pembangunan menurut Bryan White yang dikutip oleh Suryadi dalam (Milanti, 2016) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mempengaruhi masa depan yang baik (Milanti, 2016). Dalam hal ini mereka mengatakan ada 5 hal yang terlibat dalam pembangunan tersebut yaitu:

- a. *Capacity* : Pembangunan berarti membangkitkan atau mengembangkan kemampuan optimal yang ada pada diri manusia, baik individu maupun kelompok
- b. *Equity* : Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya nilai kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan
- c. *Empowerment* : Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam sebuah bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan.
- d. *Sustainability* : Pembangunan berarti membangkitkan dan menumbuhkan kemampuan untuk membangun secara mandiri
- e. *Interdependence* : Pembangunan berarti adanya peningkatan dalam mengurangi ketergantungan Negara yang lain dan menciptakan

hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya serta saling menghormati.

Menurut Nyoman dalam (K.H, 2017) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan/upaya, dimana usaha untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dan kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri. Dilihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu peningkatan taraf hidup masyarakat dapat berubah dan ditentukan oleh usaha pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban dan selalu dibutuhkan oleh semua pihak.

Menurut Suwignjo dalam (K.H, 2017) menyebutkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu pembangunan manusia yang seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya untuk aparaturnya atau pemerintah saja yang menjalankan, tetapi seluruh warga dan masyarakat yang bersangkutan dalam suatu daerah atau desa.

Selain itu menurut Tjokroamidjojo dalam (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013) suatu program dalam pembangunan yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan harus cukup jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut

- c. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten dan proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan oleh program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

A. Jenis Pembangunan

Dalam segi atau konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik menurut Kuncoro dikutip oleh Meidiani dalam (Sentosa, 2018) adalah pembangunan yang secara jelas yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang dapat dilihat oleh mata. Adapun pembangunan fisik itu berupa bangunan, infrastruktur dan fasilitas umum. Menurut B.S Muljana dalam (Sentosa, 2018) menjelaskan bahwa suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat untuk kesejahteraan bersama.

2. Pembangunan tidak Fisik

Menurut Bachtiar yang dikutip oleh Praman dalam (Sentosa, 2018) menjelaskan bahwa dalam pembangunan di suatu wilayah tentu tidak hanya mengenai program pembangunan yang bergerak di bidang fisik/ wujud, tetapi juga dibidang pembangunan non fisik seperti bakti sosial, pemberdayaan. Menurut Pramana dalam (Sentosa, 2018) menyebutkan bahwa pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan non fisik. Maka dari itu, pembangunan hendaknya saling seimbang antara pembangunan fisik atau non fisik agar dapat menjadi pembangunan yang baik

Adapun menurut (Sagai, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur menyebutkan bahwa adanya faktor penghambat dalam pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah diperlukan demi kesuksesan pembangunan tersebut.

2. Kurang Aktifnya Pemerintah

Keaktifan peran pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembangunan. Jika para pemerintah kurang aktif dalam

pelaksanaan pembangunan tidak dipungkiri masyarakat juga tidak akan berperan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

3. Faktor Tradisi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu tradisi masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dimana masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lama, apabila tradisi masyarakat acuh dengan adanya pembangunan itu akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan di desa

4. Sikap Mental Masyarakat

Sikap mental masyarakat juga diperlukan dalam proses pelaksanaan-pengawasan pembangunan, tujuannya dengan mental masyarakat yang berani mampu terjun langsung demi pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada penyelewengan anggaran.

B. Tujuan Pembangunan

Pada umumnya, setiap perencanaan pembangunan mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan pembangunan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- b. Pelayanan publik/ Masyarakat
- c. Pembangunan ekonomi
- d. Kesejahteraan masyarakat/ pengentasan kemiskinan

- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pokok

Adapun menurut Zumhariri dalam (Henryk, 2013) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
- b. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
- c. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sector.
- d. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah unsur penelitian yang terpenting dalam arti definisi tersebut yang di pakai oleh para peneliti untuk menjelaskan secara abstrak terkait dengan fenomena sosial maupun fenomena alami. Pengertian lain dari definisi konseptual yaitu merupakan penjelasan antara konsep agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keikutsertaan masyarakat (semua pihak) dalam segala kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan secara langsung dengan berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran, uang demi mencapai keberhasilan pembangunan daerah setempat.

2. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah upaya untuk menjelaskan bagaimana variable atau indikator untuk mengukur atau sebagai alat ukur terhadap penelitian ini. Definisi operasional ini juga mendeskripsikan variable terhadap data-data yang dimana agar membuat penelitian ini bersifat spesifik terkait masalah atau isi dari pada penelitian yang dilakukan.

Dalam mengukur keberhasilan suatu partisipasi dibutuhkan beberapa ukuran-ukuran tertentu. Disini peneliti mengambil beberapa alat ukur dalam berpartisipasi yang menurut peneliti lebih tepat, yaitu: Proses Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Teori Ericson

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
 1. Rapat Dusun, Rapat Desa dan Diskusi
 2. Sumbangan Pemikiran/ ide
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan
 1. Sumbangan bentuk tenaga seperti Gotong Royong
 2. Sumbangan dalam bentuk uang/ harta benda
- c. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pemanfaatan
 1. Koordinasi perkembangan pembangunan

d. Faktor yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Pekerjaan
4. Pendidikan
5. Lamanya tinggal

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Raji. Menurut (Moleong, 2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersangkutan dengan fenomena sosial dan keseharian subyek yang diteliti. Seperti tindakan, tingkah laku, dan persepsi individual maupun kelompok masyarakat.

Menurut Banister dalam (Herdiansyah, 2010) menyebutkan bahwa:

“Qualitative research is; (a) an attempt to capture the sense thlies within, and that structures what we say about what we do; (b) an exploration, elaboration and systematization of significance of an identified phenomenon; (c) the illuminative respresentation of the meaning of a delimited issued or problem.”

Dalam arti lain penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengetahui apa yang kita katakan dengan apa yang kita lihat secara

langsung, fenomena yang terjadi telah teridentifikasi secara signifikan serta masalah yang akan dibatasi.

Menurut Creswell dalam (Herdiansyah, 2010) menyebutkan bahwa:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.”

Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah proses pencarian berupa pemahaman berdasarkan metodologi masalah sosial atau manusia. Peneliti menganalisa dengan berbentuk kata-kata, membuat laporan berdasarkan informan secara terperinci, dan melakukan penelitian dalam lingkungan secara alami.

2. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari objek yang bersangkutan dengan judul penelitian, maka penulis mengambil objek lokasi penelitian di Kantor Balaidesa Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Adapun alasan mengapa mengambil Kantor Balaidesa dalam penelitian ini adalah karena pembangunan desa ditangani langsung oleh pemerintah desa yaitu seksi pembangunan. Diharapkan dengan diambilnya lokasi tersebut dapat mempermudah serta memperjelas objek yang menjadi sasaran dari penelitian.

3. Unit Analisa

Unit analisa data adalah satuan objek tertentu yang akan dijadikan sebagai subjek tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisa datanya adalah Kantor Desa Raji yaitu pada Kepala Desa Raji, Sekretaris Raji. Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa juga menjadi unit analisa dalam penelitian ini.

Tabel 1. 1 Unit Analisa

No	Instansi	Narasumber	Jumlah
1.	Pemerintah Desa Raji	Kepala Desa	1
		Sekretaris Desa	1
		Kepala Urusan Pembangunan Desa	1
2.	Badan Permusyawaratan Desa	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Raji	2
3.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa	4/5

Sumber: Data Desa Raji

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data

yaitu yang pertama yakni wawancara. Adapun observasi, dokumentasi selanjutnya yang digunakan sebagai data pelengkap.

a. Observasi

Dalam pengumpulan data observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh suatu gambaran tempat yang diteliti. Adapun pelaksanaan teknik ini dengan cara peneliti terjun langsung ke dalam lingkungan subyek untuk mendapatkan data dan informasi secara sistematis. Observasi ini dilakukan pada Kantor Balai Desa Raji.

b. Wawancara

Menurut (Moleong, 2016) wawancara merupakan suatu bentuk interaksi dalam percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun pihak yang mengajukan pertanyaan disebut *interviewer* (orang yang mewawancarai) sedangkan pihak yang dapat memberikan jawaban guna menjawab pertanyaan tersebut adalah narasumber (orang yang diwawancarai). Terdapat dua jenis wawancara yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapaun wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dengan menggunakan penyusunan daftar pertanyaan yang sistematis sesuai fokus penelitian, petunjuk, pedoman, yang digunakan sebelum menanyakan pertanyaan kepada narasumber seperti urutan dan daftar pertanyaan, sedangkan wawancara tidak

terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan diluar fokus pertanyaan tanpa daftar pertanyaan tetapi masih dalam tema dan konteks dari penelitian. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini, informasi dan data yang dibutuhkan yaitu mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa Raji, Sekretaris Desa Raji, Badan Permusyawarah Desa dan Kepala Bidang Pembangunan Desa.

c. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2006) Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data maupun informasi berupa buku, catatan, surat kabar dan majalah. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan yaitu mengenai data pemerintah desa, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, struktur organisasi desa, daftar pembangunan infrastruktur yang sudah dicapai dan yang sedang dikerjakan, daftar sumber dana yang tercatat, rincian anggaran dana untuk pembangunan desa dan kegiatan pembangunan, daftar pendidikan terakhir aparat pemerintah desa, pelatihan atau skill yang pernah di ikuti dan daftar prestasi yang diperoleh desa tersebut.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut (Arikunto, 2006) menyebutkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang kondisi dan fenomena yang terjadi di desa tersebut.

Tabel 1. 2 Data Primer

(Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Intensitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa	Badan Permusyawaratan Desa	Wawancara dan Observasi
Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan desa	Kepala Desa	Wawancara dan Observasi
Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa	Sekretaris Desa dan Kepala bidang pembangunan desa	Wawancara dan Observasi

mber: Diolah oleh Peneliti 2019)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari tangan kedua atau orang lain seperti jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapaun data sekunder digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kekurangan data primer dan dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian. Maka data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berkas, dokumen, arsip, dan laporan.

Tabel 1. 3 Data Sekunder

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Kondisi Wilayah / Demografi	Dokumentasi
Sejarah mengenai Desa Raji	Dokumentasi
Profil Pemerintahan Desa Raji	Dokumentasi
Data Penduduk berdasarkan Usia	Dokumentasi
Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	Dokumentasi
Data Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	Dokumentasi

(Sumber: Dokumentasi Desa Raji Tahun 2017)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif, adapun dalam penelitian kualitatif didapat menggunakan beberapa langkah yaitu: Reduksi, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

a. Reduksi

Reduksi data diperoleh dengan menelaah data mengenai relevan tidaknya antara data yang digunakan dengan tujuan penelitian. Informasi atau data mentah yang diperoleh dari lapangan/ narasumber kemudian diolah, diringkas, disusun secara sistematis agar mudah dimengerti dengan langkah memetakan dan menyesuaikan jawaban yang diperoleh dari narasumber. Jika peneliti menemukan jawaban

yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber, maka jawaban tersebut disimpan dan dijadikan pembandingan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian digunakan sebagai gambaran mengenai bagian-bagian dari keseluruhan penelitian. Pada tahap ini penulis membuat dan menyajikan data dengan mencocokkan pokok masalah yang diambil. Dimulainya dalam bagian ini dengan memberikan kode yang berisi informasi mengenai latar, topik, dan subjek di setiap sub bagian masalah. Selanjutnya harus mencocokkan dengan teori yang diambil dalam penelitian, adanya pengkodean yang dilakukan dalam awal bagian yang digunakan untuk memilih jawaban relevan/ cocok yang telah diberikan dari narasumber atau temuan data di lapangan. Kemudian data tersebut dicocokkan dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, baik itu data sekunder dan data primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dengan resume sesuai teori yang diambil.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Setelah melakukan penyajian data, maka selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang digunakan dalam mencari makna persamaan maupun perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber dengan konsep dasar/ teori yang digunakan

dalam penelitian ini, sedangkan verifikasi data bertujuan untuk penilaian adanya kesesuaian antara data yang di peroleh dengan konsep maupun teori yang digunakan agar penelitian lebih tepat sasaran. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data digunakan setelah adanya perbandingan data yang dipilih sesuai dengan topik yang diambil dalam penelitian, kemudian dianalisa dengan metode dan sumber-sumber yang relevan dan kuat.